



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 430 TAHUN 2024

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2024 - 2027

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah yang profesional, efektif, efisien dan transparan, perlu peningkatan penata kelolaan pemerintahan berbasis elektronik dalam bentuk peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantuan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Agustus 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 430 TAHUN 2024
TENTANG
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024-
2027

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2024-2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan satu kali dalam lima tahun dan direvisi pada paruh waktu dan tahun akhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Revisi tersebut dilakukan berdasarkan perubahan Peta Rencana SPBE Nasional, perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah; perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Kesiapan Infrastruktur SPBE yang terencana dengan baik dalam peta rencana SPBE akan mempermudah atau mempercepat Kabupaten Pesisir Selatan dalam menuju Smart City, dimana dapat memberikan layanan dan informasi yang cepat, murah, mudah, dan tuntas. Peta Rencana SPBE memuat Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

A. Tahapan Peta Rencana SPBE

1. Tahap Informasi: Tahap Informasi merupakan tahap pertama yang direalisasikan. Objektif dari tahap ini adalah untuk menyediakan berbagai layanan informasi ke pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara efektif dan efisien dengan mengurangi penggunaan kertas serta mengubah penyampaian informasi dan data secara manual menjadi secara elektronik. Fokus pengembangan adalah pada berbagai sistem informasi dan aplikasi berbasis Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) yang digunakan untuk publikasi data dan informasi bagi para stakeholder di internal pemerintah daerah maupun pihak eksternal seperti kalangan bisnis dan masyarakat umum.

2. Tahap Transformasi: Tahap Transformasi merupakan tahap kedua dalam Peta Rencana. Objektif dari tahap ini adalah untuk mengubah seluruh proses layanan dan transaksi pemerintahan yang masih manual sehingga menjadi terotomasi secara elektronik agar lebih efektif, efisien, dan transparan. Fokus pengembangan adalah pada berbagai sistem informasi dan aplikasi yang memberikan layanan dan transaksi kepada sesama instansi pemerintah daerah maupun pihak eksternal seperti kalangan bisnis dan masyarakat umum.
3. Tahap Integrasi: Tahap Integrasi merupakan tahap ketiga dalam Peta Rencana. Obyektif dari tahap ini adalah untuk melakukan integrasi terhadap berbagai sistem informasi layanan pemerintahan yang telah direalisasikan pada Tahap Informasi dan Tahap Transformasi sehingga dapat saling bertukar data, informasi, dan layanan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
4. Tahap SPBE: Tahap SPBE merupakan tahap keempat dan terakhir dalam Peta Rencana. Obyektif dari tahap ini adalah untuk menyediakan akses dan transaksi layanan pemerintahan kapan saja dan di mana saja bagi semua OPD, kalangan bisnis, dan masyarakat umum secara efektif, efisien, transparan, dan terpadu dengan mendayagunakan seluruh kemampuan dan sumber daya TIK termasuk teknologi mobile secara optimal.

B. Matriks Peta Rencana SPBE (2024-2027)

Peta rencana SPBE untuk menuju smart city dengan sasaran mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Tujuan Smart city untuk meningkatkan kualitas layanan publik (public service), meningkatkan manajemen birokrasi (bureaucracy) dan kebijakan publik (public policy) lebih efisien.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun:

Peta Rencana SPBE Nasional	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat	Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
•Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMN •Disusun oleh Kemen PANRB	•Berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Renstra	•Berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemda, RPJMD

Gambar 1. Matriks Peta Rencana SPBE

BAB II
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2024-2027

2.1. Peta Rencana Tata Kelola

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel transparan dan profesional perlu didukung dengan penerapan tata kelola SPBE yang terintegrasi dengan unsur utama yaitu koordinasi, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Penerapan unsur utama tatakelola dimaksud berarti bahwa pengelolaan pemerintahan harus terkoordinasi dengan sinergi yang baik antar perangkat daerah, dilaksanakan secara transparan, seluruh entitas pemerintah daerah berkontribusi dan berkolaborasi dalam berpartisipasi mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan terukur dan akuntabel.

Sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terintegrasi dimaksud perlu diselenggarakan dan diorganisir secara formal dengan penyempurnaan kebijakan internal terkait dasar pelaksanaan dan struktur organisasi pelaksana SPBE.

Peta Rencana untuk Tata kelola SPBE adalah sebagai berikut:

- a. Perbaikan regulasi kebijakan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kota Padang
- b. Reviu dan Pengembangan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Kota Padang
- c. Menyelaraskan tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi SPBE
- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penilaian SPBE
- e. Pembuatan laporan atas penilaian SPBE

2.2. Peta Rencana Manajemen

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE merupakan inti dari pengelolaan SPBE setelah dibangun.

Manajemen SPBE meliputi manajemen layanan, perubahan, risiko, data, pengetahuan, sumber daya manusia, keamanan informasi dan aset teknologi informasi. Dalam tata kelola ini terdapat leading sector serta anggota spesifik yang memiliki tanggung jawab manajemen yang lebih besar daripada Perangkat Daerah yang dirujuk secara umum.

Peta Rencana Manajemen SPBE Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan dan/atau revidir kebijakan manajemen SPBE;
- b. Pembuatan pedoman pelaksanaan manajemen SPBE;
- c. Penerapan Manajemen SPBE:
 - 1) Penerapan manajemen layanan;
 - 2) Penerapan manajemen risiko;
 - 3) Penerapan manajemen keamanan;
 - 4) Penerapan manajemen data;
 - 5) Penerapan manajemen aset dan teknologi;
 - 6) Penerapan manajemen SDM;
 - 7) Penerapan manajemen pengetahuan; dan
 - 8) Penerapan manajemen perubahan.
- d. Evaluasi dan Pelaporan hasil penerapan manajemen

2.3. Peta Rencana Layanan

Peta rencana layanan SPBE di Pemerintah Kota Padang menyangkut layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Layanan administrasi pemerintahan menyangkut kebutuhan administrasi oleh publik, badan usaha dan pemerintahan. Sedangkan layanan publik menyangkut kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan layanan pemerintah.

Peta Rencana Layanan SPBE Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan atau Perbaikan kembali kebijakan internal berupa peraturan, SOP layanan SPBE dan kebijakan lainnya;
- b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (hosting)
- c. Penatalaksanaan dan Pengawasan implementasi sistem informasi/aplikasi layanan administrasi pemerintah :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan;
 - 2) Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 3) Kepegawaian;
 - 4) Tata Naskah Dinas dan Kearsipan;
 - 5) Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 6) Pengawasan Pemerintah;
 - 7) Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi;
 - 8) Kinerja Pegawai;
 - 9) Dan urusan Lainnya
- d. Penyediaan akses internet yang berkualitas
- e. Pengembangan dan perbaikan layanan publik:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Perizinan;
- 4) Pariwisata;
- 5) Layanan Data dan Informasi;
- 6) Layanan Pengaduan;
- 7) Dan urusan lainnya

- f. Audit Layanan SPBE
- g. Tindak lanjut hasil Audit.
- h. Survey Layanan

2.4. Peta Rencana Aplikasi

Peta Rencana Aplikasi SPBE meliputi aplikasi yang dikembangkan pada layanan yang direncanakan untuk dikembangkan pada rencana SPBE Pemerintah Kota Padang.

Peta rencana aplikasi SPBE ini juga terbagi atas jenjang penanggung jawab aplikasi tersebut. Maka dari itu, Pemerintah Kota Padang melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kab/Kota Lain dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Pemerintah Pusat dalam operasionalisasi aplikasi sistem informasi tersebut.

Peta Rencana Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:

- a. Perbaikan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE;
- b. Pengembangan aplikasi khusus sesuai kebutuhan perangkat daerah dan/atau Arsitektur Proses Bisnis SPBE
- c. Koordinasi aplikasi umum dan aplikasi khusus pemerintah pusat;
- d. Pengembangan Integrasi antar aplikasi
- e. Pengembangan portal data Pemerintah Kota Padang sesuai Satu Data Indonesia;
- f. Penggunaan Aplikasi Umum di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian dan pengaduan pelayanan publik
- g. Audit aplikasi SPBE; dan
- h. Tindak lanjut hasil Audit.

2.5. Peta Rencana Infrastruktur

Peta Rencana Infrastruktur SPBE di Pemerintah Kota Padang fokus kepada infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik terdiri atas infrastruktur penghubung, infrastruktur pengelola dan infrastruktur operasional.

Infrastruktur penghubung meliputi jaringan internet dan intranet. Infrastruktur pengelola yaitu berupa server sedangkan infrastruktur operasional yaitu komputer operasional SPBE. Sedangkan untuk pendukung infrastruktur penghubung, diperlukan infrastruktur intranet dan internet dalam jaringan sistem informasi.

Infrastruktur internet terdiri atas jaringan teresterial melalui kabel Fiber Optic yang dikelola dengan provider, WIFI dan penghubung jaringan internet dan perangkat yang mengoperasikan aplikasi.

Sedangkan infrastruktur intranet terdiri atas perangkat server, penghubung komputer operasional OPD dengan server, software aplikasi dan keamanannya.

Peta Rencana Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kota Padang
- b. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- c. Penyelenggaraan Jaringan Internet Pemerintah Kota Padang
- d. Penyelenggaraan Jaringan Intranet Pemerintah Kota Padang
- f. Pemanfaatan Layanan Pusat Data Nasional
- g. Audit infrastruktur SPBE; dan
- h. Tindak lanjut hasil Audit.

2.6. Peta Rencana Keamanan

Peta rencana keamanan SPBE meliputi keamanan hardware, keamanan software, keamanan data dan keamanan dari server secara khusus. Keamanan hardware dalam hal ini adalah keamanan komputer OPD dan jaringan penghubung baik Fiber Optic (FO) maupun jaringan lainnya. Keamanan hardware dilakukan dengan perlindungan eksternal. Sedangkan keamanan software meliputi proteksi antivirus dan malware. Keamanan data meliputi proteksi data dari informasi palsu. Sedangkan keamanan server memitigasi dari adanya peretasan.

Peta Rencana Keamanan SPBE Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian keamanan informasi SPBE terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastuktur SPBE
- b. Pembangunan server backup atau server bayangan;
- c. Pembentukan Computer Security Incident Response Team Padang-CSIRT melalui Surat Keputusan Wali Kota Padang;
- d. Pembentukan Agen Padang-CSIRT sebagai perwakilan tim tanggap insiden siber di perangkat daerah;

- e. Melaksanakan penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) secara mandiri dan verifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara untuk menilai kesiapan organisasi dalam penerapan keamanan informasi;
- f. Bimbingan Teknis Kewaspadaan Kebocoran Data, Kewaspadaan Malware dan Sosialisasi Penerapan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bagi Team CSIRT dan Agen CSIRT Pemerintah Kota Padang
- g. Penerapan metode penyimpanan data enkripsi secara bertahap pada aplikasi;
- h. Melaksanakan Vulnerability Assessment secara berkala pada domain dan sub domain padang.go.id;
- i. Melaksanakan Penetration Test dan/atau IT Security Assessment (ITSA) secara regular;
- i. Tindak lanjut hasil Vulnerability Assessment dan hasil Penetration Test dan/atau ITSA.
- j. Melaksanakan kegiatan penanganan insiden siber berdasarkan hasil monitoring siber rutin dan pengaduan siber melalui kanal e-ticketting Padang-CSIRT.

2.7. Audit TIK

Audit Teknologi SPBE yang berkelanjutan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting. Audit harus dilakukan secara berkala untuk menjamin terpenuhinya berbagai prinsip SPBE seperti efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, serta keamanan yang tinggi. Audit dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Audit juga harus mengacu pada standar audit sistem informasi yang berlaku secara internasional. Dengan demikian, Tim Audit internal harus sudah mendapatkan sertifikasi dari lembaga resmi dalam konteks audit sistem informasi.

Peta Rencana Audit TIK Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan kembali Kebijakan Internal SK atau aturan audit SPBE;
- b. Melaksanakan audit aplikasi SPBE sesuai petunjuk teknis dari BRIN
- c. Melaksanakan audit infrastruktur SPBE sesuai petunjuk teknis dari BRIN
- d. Melaksanakan audit keamanan SPBE berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi secara mandiri oleh Inspektorat Kota Padang sebagai auditor;
- e. Melaksanakan audit keamanan SPBE berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi secara eksternal oleh Badan Siber dan Sandi Negara;
- f. Melaksanakan tindak lanjut hasil audit berdasarkan hasil rekomendasi auditor.

BAB. III
MATRIKS PETA RENCANA SPBE

3.1. Matrix Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Padang Tahun 2024-2027

No	Program Kerja	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggung Jawab	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
Arah Kebijakan : Pemerintahan Umum							
Inisiatif Strategis : Pembangunan portal layanan publik dan layanan administrasi Pemerintah Kota Padang							
1	Tata Kelola						
	a. Perbaikan regulasi kebijakan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kota Padang		Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi, Bagian Hukum	V	V	V	V
	b. Reviu dan Pengembangan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Kota Padang		Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi	V	V	V	V
	c. Menyelaraskan tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi SPBE		Diskominfo, Sekretariat Daerah	V	V	V	V
	d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penilaian SPBE		Diskominfo	V	V	V	V
	e. Pembuatan laporan atas penilaian SPBE		Diskominfo	V	V	V	V
2	Manajemen						
	a. Pembuatan dan/atau reviu kebijakan internal manajemen SPBE		Diskominfo, Bagian Hukum	V	V	V	V

No	Program Kerja	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggung Jawab	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	b. Pembuatan pedoman pelaksanaan manajemen SPBE		Diskominfo, BKPSDM, Inspektorat, Bagian Organisasi	V	V	V	V
	c. Penerapan Manajemen Resiko SPBE		Inspektorat, Diskominfo	V	V	V	V
	d. Penerapan manajemen keamanan informasi		Diskominfo	V	V	V	V
	e. Penerapan manajemen data		Diskominfo	V	V	V	V
	f. Penerapan manajemen aset TIK		Diskominfo	V	V	V	V
	g. Penerapan manajemen sumber daya manusia SPBE		BKPSDM	V	V	V	V
	h. Penerapan manajemen pengetahuan		Diskominfo	V	V	V	V
	i. Penerapan manajemen perubahan		Bagian Organisasi	V	V	V	V
	j. Penerapan manajemen layanan SPBE		Diskominfo	V	V	V	V
	k. Evaluasi penerapan manajemen SPBE		Diskominfo, BKPSDM, Inspektorat, Bagian Organisasi	V	V	V	V
3	Layanan						
	a. Pembuatan atau Perbaikan kembali kebijakan internal		Diskominfo, Bagian Hukum	V	V	V	V
	b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Diskominfo	V	V	V	V

No	Program Kerja	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggung Jawab	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Daerah					
	c. Penatalaksanaan dan Pengawasan implementasi sistem informasi/ aplikasi layanan administrasi pemerintah	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo	V	V	V	V
	d. Penyediaan akses internet yang berkualitas	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	V	V	V	V
	e. Pengembangan dan perbaikan layanan publik	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo, OPD Teknis Layanan Publik	V	V	V	V
	f. Audit Layanan SPBE		Diskominfo	V	V	V	V
	g. Tindak Lanjut Hasil Audit SPBE		Diskominfo	V	V	V	V
	h. Survey layanan		Diskominfo, Bagian Organisasi	V		V	
4	Aplikasi						
	a. Perbaikan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE;		Diskominfo	V	V	V	V
	b. Pengembangan aplikasi khusus sesuai kebutuhan perangkat daerah dan/atau Arsitektur Proses Bisnis SPBE	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo, OPD terkait	V	V	V	V
	c. Koordinasi aplikasi umum dan aplikasi khusus pemerintah pusat		Diskominfo, OPD terkait	V	V	V	V

No	Program Kerja	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggung Jawab	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	d. Pengembangan Integrasi antar aplikasi	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo, OPD terkait	V	V	V	V
	e. Pengembangan portal data Pemerintah Kota Padang sesuai Satu Data Indonesia	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo, OPD terkait	V	V	V	V
	f. Penggunaan Aplikasi Umum di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian dan pengaduan pelayanan publik		Diskominfo, OPD terkait	V	V	V	V
	g. Audit aplikasi SPBE		Diskominfo	V	V	V	V
	h. Tindak lanjut hasil Audit SPBE		Diskominfo	V	V	V	V
5	Infrastruktur						
	a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kota Padang	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Diskominfo	V	V	V	V
	b. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	V	V	V	V
	c. Penyelenggaraan Jaringan Internet Pemerintah Kota Padang	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	V	V	V	V

No	Program Kerja	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggung Jawab	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	d. Penyelenggaraan Jaringan Intranet Pemerintah Kota Padang	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	V	V	V	V
	e. Pemanfaatan Layanan Pusat Data Nasional		Diskominfo	V	V	V	V
	f. Audit infrastruktur SPBE		Diskominfo	V	V	V	V
	g. Tindak lanjut hasil Audit		Diskominfo	V	V	V	V
6	Keamanan						
	a. Pengendalian keamanan informasi SPBE terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastuktur SPBE	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	V	V	V	V
	b. Pembangunan server backup atau server bayangan;	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Diskominfo	V	V	V	V
	c. Pembentukan Computer Security Incident Response Team Padang-CSIRT melalui Surat Keputusan Wali Kota Padang	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	V	V	V	V
	d. Pembentukan Agen Padang-CSIRT sebagai perwakilan tim tanggap insiden siber di perangkat daerah;	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	V	V	V	V
	e. Melaksanakan penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) secara mandiri dan verifikasi dari Badan Siber dan Sandi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo	V	V	V	V

No	Program Kerja	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggung Jawab	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
7	Audit TIK						
	a. Pembuatan kembali Kebijakan Internal SK atau aturan audit SPBE		Diskominfo	V	V	V	V
	b. Melaksanakan audit aplikasi SPBE sesuai petunjuk teknis dari BRIN		Diskominfo	V	V	V	V
	c. Melaksanakan audit infrastruktur SPBE sesuai petunjuk teknis dari BRIN		Diskominfo	V	V	V	V
	d. Melaksanakan audit keamanan SPBE berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi secara mandiri oleh Inspektorat Kota Padang sebagai auditor;	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Inspektorat	V	V	V	V
	e. Melaksanakan audit keamanan SPBE berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi secara eksternal oleh Badan Siber dan Sandi Negara;	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BSSN	-	V	V	V
	f. Melaksanakan tindak lanjut hasil audit berdasarkan hasil rekomendasi auditor.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	V	V	V	V

3.2. Detail Rencana Program Kerja pada Peta Rencana SPBE Tahun 2024-2027

Detail inisiatif Pembangunan portal layanan publik dan layanan administrasi Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola

1.a. Perbaikan regulasi kebijakan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kota Padang

Kode Program	1.a
Program Kerja	Perbaikan regulasi kebijakan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kota Padang
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi, Bagian Hukum
Rincian Program Kerja	- memahami konsep dasar penyelenggaraan SPBE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. - memahami alur kerja Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE. - melakukan evaluasi dan/atau reviu terhadap kebijakan penyelenggaraan SPBE sesuai arahan pemerintah pusat. - Melakukan perbaikan regulasi kebijakan penyelenggaraan SPBE sesuai rekomendasi hasil reviu - mendapatkan pengesahan perbaikan regulasi kebijakan dari bagian hukum Setda Kota Padang
Output yang dihasilkan	- dokumen kebijakan SPBE dalam bentuk Perwako/SK - notulensi/catatan/laporan, foto dan dokumen lainnya terkait reviu kebijakan SPBE yang dilakukan Tim Koordinasi SPBE

1.b. Reviu dan Pengembangan Dokumen Aristektur dan Peta Rencana Pemerintah Kota Padang

Kode Program	1.b
Program Kerja	Reviu dan Pengembangan Dokumen Aristektur dan Peta Rencana Pemerintah Kota Padang
Tahun	2024, 2026
Penanggung jawab	Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi
Rincian Program Kerja	- memahami konsep dasar arsitektur SPBE yang sesuai referensi arsitektur dan referensi domain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - memahami metode penulisan arsitektur SPBE (Prinsip, Matrik dan Diagram) - input data arsitektur menggunakan aplikasi

	sistem informasi arsitektur SPBE versi terbaru 4. menyusun dokumen arsitektur sesuai basis data sistem informasi arsitektur SPBE versi terbaru. 5. melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi arsitektur 6. mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari bagian hukum Setda Kota Padang 7. melakukan FGD Inovasi Proses Bisnis 8. melakukan FGD Review dan evaluasi Peta Proses Binis
Rincian khusus kegiatan	1. Diskominfo meminta login sistim informasi arsitektur SPBE 2. Diskominfo mempelajari penggunaan sistim informasi arsitektur SPBE 3. Diskominfo berkoordinasi dengan Bappeda dan Bagian Organisasi terkait supply data proses bisnis Pemerintah Kota Padang 4. Diskominfo melakukan pengumpulan data domain arsitektur SPBE dari beberapa perangkat daerah 5. Diskominfo melakukan Input data arsitektur menggunakan aplikasi sistem informasi arsitektur SPBE 6. Menyusun dokumen arsitektur sesuai basis data sistem informasi arsitektur SPBE 7. Menyusun SK Wali Kota tentang Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Padang
Output yang dihasilkan	1. dokumen arsitektur SPBE lengkap yang sesuai referensi arsitektur dan referensi domain. 2. kebijakan penyelenggaraan SPBE yang telah sesuai peraturan perundang-undangan 3. dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal. 4. dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal. 5. arsitektur SPBE telah diinputkan ke SIA versi terbaru. 6. notulensi / catatan / laporan hasil reviu/evaluasi dokumen arsitektur SPBE dan kebijakan SPBE.

1.c. Menyelaraskan tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi SPBE

Kode Program	1.c
Program Kerja	Menyelaraskan tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggung jawab	Diskominfo, Bagian Hukum Setda Kota Padang

Rincian Program Kerja	1. menentukan Anggota Tim Koordinasi SPBE 2. menentukan tupoksi dan program kerja Tim 3. merumuskan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE 4. membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut 5. menerbitkan SK Tim SPBE setiap tahun 6. sosialisasi dan harmonisasi program kerja Tim Koordinasi SPBE
Output yang dihasilkan	1. SK Tim Koordinasi SPBE setiap tahun 2. Notulensi/catatan/laporan, foto dan dokumen lainnya terkait tugas/program kerja yang dilakukan Tim Koordinasi SPBE

1.d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penilaian SPBE

Kode Program	1.d
Program Kerja	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penilaian SPBE
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. menentukan Anggota Tim Pelaksana SPBE 2. menentukan Tupoksi dan program kerja Tim Pelaksana SPBE 3. merumuskan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE sesuai pedoman monev pelaksanaan SPBE dari MenPANRB setiap tahun 4. merumuskan rekomendasi pelaksanaan monev SPBE setiap tahun 5. menerbitkan SK Tim Pelaksana SPBE setiap tahun 6. sosialisasi monev pelaksanaan SPBE setiap tahun.
Output yang dihasilkan	1. SK Tim Pelaksana SPBE setiap tahun 2. Notulensi/catatan/laporan, foto dan dokumen lainnya terkait tugas/program kerja yang dilakukan Tim Pelaksana SPBE dalam penilaian SPBE

1.e. Pembuatan laporan atas penilaian SPBE

Kode Program	1.e
Program Kerja	Pembuatan laporan atas penyelenggaraan SPBE
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. menyusun laporan atas penilaian SPBE 2. menyusun evaluasi atas penilaian SPBE 3. sosialisasi laporan penilaian SPBE setiap tahun.

Output yang dihasilkan	1. SK Tim Pelaksana SPBE setiap tahun 2. Notulensi/catatan/laporan, foto dan dokumen lainnya terkait tugas penilaian SPBE
------------------------	--

2. Manajemen

2.a. Pembuatan dan/atau reviu kebijakan internal manajemen SPBE

Kode Program	2.a
Program Kerja	Pembuatan dan/atau reviu kebijakan internal manajemen SPBE
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo, Bagian Hukum
Rincian Program Kerja	- memahami konsep dasar manajemen SPBE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. - mencari referensi pedoman dari peraturan manajemen SPBE dari K/L terkait. - melakukan evaluasi dan/atau reviu terhadap kebijakan manajemen SPBE sesuai arahan pemerintah pusat. - Melakukan penyusunan/perbaikan regulasi kebijakan manajemen SPBE sesuai rekomendasi hasil reviu - mendapatkan pengesahan perbaikan regulasi kebijakan dari Bagian Hukum
Output yang dihasilkan	- dokumen kebijakan manajemen SPBE dalam bentuk SK - notulensi/catatan/laporan, foto dan dokumen lainnya terkait reviu kebijakan manajemen SPBE yang telah dilakukan

2.b. Pembuatan pedoman pelaksanaan manajemen SPBE

Kode Program	2.b
Program Kerja	Pembuatan pedoman pelaksanaan manajemen SPBE
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo, BKPSDM, Inspektorat, Bagian Organisasi
Rincian Program Kerja	- memahami konsep dasar manajemen SPBE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Mencari referensi peraturan manajemen SPBE dari K/L terkait. - Melakukan pembuatan pedoman pelaksanaan manajemen SPBE sesuai referensi - mendapatkan pengesahan SK pedoman pelaksanaan manajemen SPBE dari Bagian Hukum - sosialisasi pedoman pelaksanaan manajemen SPBE

Output yang dihasilkan	1. dokumen pedoman pelaksanaan manajemen SPBE dalam bentuk SK 2. notulensi/catatan/laporan, foto dan dokumen lainnya terkait pembuatan kebijakan manajemen SPBE yang telah dilakukan
------------------------	---

2.c. Penerapan manajemen risiko SPBE

Kode Program	2.c.
Program Kerja	Penerapan manajemen resiko SPBE
Kegiatan/Sub Kegiatan	
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Inspektorat, Diskominfo
Rincian program kerja	1. Memahami konsep dasar penerapan manajemen risiko SPBE 2. Menyusun dokumen manajemen/kontrol risiko SPBE 3. Merumuskan isu-isu strategis manajemen risiko SPBE terhadap perkembangan SPBE 4. Menyusun form manajemen risiko SPBE
Rincian khusus kegiatan tahun 2024	1. Melakukan penyusunan/reviu manajemen risiko SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Menyusun dokumen manajemen/kontrol risiko SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Merumuskan isu-isu strategis manajemen risiko SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Menyusun form manajemen risiko SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang
Output yang dihasilkan	Form manajemen risiko SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang

2.d. Penerapan manajemen keamanan informasi

Kode Program	2.d.
Program Kerja	Penerapan manajemen keamanan informasi
Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Memahami konsep dasar penerapan manajemen keamanan informasi SPBE 2. Penyusunan/reviu pedoman manajemen keamanan informasi SPBE 3. Menyusun SOP untuk identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan dan evaluasi keamanan informasi 4. Pembuatan Tim CSIRT Kota Padang dan Agen

	CSIRT Perangkat Daerah. 5. Melaksanakan kegiatan edukasi keamanan informasi untuk Tim CSIRT dan Agen CSIRT 6. Monitoring dan evaluasi penerapan manajemen keamanan informasi
Rincian khusus kegiatan tahun 2024	1. Melakukan penyusunan/review manajemen keamanan informasi SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan verifikasi indeks Keamanan Informasi (KAMI) secara eksternal dengan BSSN 3. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi di server CPANEL yang digunakan seluruh perangkat daerah berupa konfigurasi serta upgrade versi CPANEL, dan modul CPANEL, pemeriksaan folder dan file-file coding, pemeriksaan halaman login aplikasi, pemeriksaan enkripsi password pada database table user sesuai Perwako 27 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Informasi SPBE pada Bab III Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE. 4. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengendalian keamanan informasi pada jaringan di lingkungan Pemerintah Kota Padang berupa setiap WIFI harus mempunyai login page dan konfigurasi jaringan intra yang bersifat rahasia dan tertutup 5. Pembelian Anti Virus Berlisensi yang dibagikan kepada Perangkat Daerah 6. Pembelian Plugin Imunify360 CPANEL untuk sistem pertahanan keamanan, optimasi security dari sisi web server terhadap malware, serangan ddos, injection, dll. 7. Pembentukan Tim CSIRT Kota Padang dan Agen CSIRT perangkat daerah
Output yang dihasilkan	1. Dokumen kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dalam bentuk Perwako/SK 2. Dokumen SOP manajemen keamanan informasi 3. Dokumentasi kegiatan penerapan manajemen keamanan informasi yang dilakukan Dinas Kominfo terhadap seluruh perangkat daerah 4. Notulensi/catatan/laporan, foto dan dokumen lainnya terkait review manajemen keamanan informasi yang dilakukan

2.e. Penerapan manajemen data

Kode Program	2.e.
Program Kerja	Penerapan manajemen data
Kegiatan/Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data

	Statistik Sektoral
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Penyusunan/reviu pedoman manajemen data 2. Menyusun domain arsitektur data dan informasi berdasarkan referensi arsitektur dan referensi domain 3. Menyusun data induk dan data referensi 4. Menyiapkan penyimpanan data yang akurat, mutakhir dan terkelola dengan baik 5. Melakukan pengelolaan, menjaga kualitas data dan standarisasi data berbagi pakai (data induk dan data referensi) 6. Melakukan pengumpulan, pengkategorian, dan pengelolaan metadata statistik yang didapat dari perangkat daerah 7. Menggunakan aplikasi Indonesia Data HUB dalam mendefinisikan data 8. Monitoring dan evaluasi penerapan manajemen data
Rincian khusus kegiatan tahun 2024	1. Melakukan penyusunan/reviu manajemen data pada Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Melakukan penyusunan domain arsitektur data dan informasi berdasarkan referensi arsitektur dan referensi domain 3. Menyusun data induk dan data referensi yang berhubungan dengan data statistik sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Melakukan pengelolaan, menjaga kualitas data dan standarisasi data induk dan data referensi yang berhubungan dengan data statistik sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Melakukan pengumpulan, pengkategorian, dan pengelolaan metadata statistik yang didapat dari perangkat daerah 6. Menggunakan aplikasi Indonesia Data HUB dalam mendefinisikan data 7. Monitoring dan evaluasi penerapan manajemen data terhadap metadata statistik yang telah dikelola
Output yang dihasilkan	1. Dokumen kebijakan Manajemen Data Informasi dalam bentuk Perwako/SK 2. Dokumen SOP pengumpulan data sektoral perangkat daerah 3. Dokumen laporan kegiatan pengumpulan data sektoral dilakukan Dinas Kominfo terhadap seluruh perangkat daerah 4. Notulensi/catatan/laporan, foto dan dokumen lainnya terkait reviu manajemen data yang dilakukan Tim Koordinasi SPBE

2.f. Penerapan manajemen aset TIK

Kode Program	2.f.
Program Kerja	Penerapan manajemen aset TIK
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Penyusunan/reviu pedoman manajemen aset TIK meliputi (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK) 2. Melakukan penelitian tentang tata cara penyusunan aset TIK 3. Menyusun daftar aset TIK Pemerintah Kota Padang 4. Menyusun perencanaan aset TIK Pemerintah Kota Padang 5. Menyusun SOP pengadaan aset TIK di lingkungan Pemerintah Kota Padang 6. Menyusun SOP pengelolaan aset TIK 7. Menyusun SOP penghapusan aset TIK 8. SOP Identifikasi dan Klasifikasi Aset
Rincian khusus kegiatan tahun 2024	1. Melakukan penelitian tentang tata cara penyusunan inventarisasi aset TIK Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Membuat SOP Identifikasi dan Klasifikasi Aset TIK Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Melakukan penyusunan daftar aset TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Output yang dihasilkan	1. Laporan inventarisasi aset Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dokumen SOP Identifikasi dan Klasifikasi Aset Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Dokumen daftar aset TIK Dinas Komunikasi dan Informatika

2.g. Penerapan manajemen sumber daya manusia SPBE

Kode Program	2.g.
Program Kerja	Penerapan manajemen sumber daya manusia SPBE
Kegiatan/Sub Kegiatan	
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Penyusunan/reviu pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE 2. Menetapkan jenis kompetensi teknis SDM yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan SPBE 3. Menyusun perencanaan formasi SDM penyelenggara SPBE 4. Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi SDM sesuai jenis kompetensi

	(pelatihan, dll) 5. Monitoring kinerja SDM penyelenggara SPBE
Rincian khusus kegiatan tahun 2024	1. BKPSDM menyusun formasi SDM penyelenggara SPBE 2. BKPSDM menyusun Dokumen Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi untuk beberapa atau seluruh perangkat daerah 3. BKPSDM melaksanakan kegiatan pelatihan berdasarkan dokumen tersebut 4. BKPSDM melakukan dokumentasi kegiatan pelatihan 5. BKPSDM melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan pelatihan 6. Diskominfo membuat aplikasi terkait manajemen SDM SPBE jika dibutuhkan oleh BKPSDM
Output yang dihasilkan	1. Dokumen kebijakan Manajemen sumber daya manusia SPBE dalam bentuk Perwako/SK 2. Dokumen perencanaan formasi SDM penyelenggara SPBE 3. Dokumen road map pelatihan 4. Dokumen kebutuhan dan pemenuhan SDM penyelenggara SPBE 5. Dokumen kinerja SDM penyelenggara SPBE

2.h. Penerapan manajemen pengetahuan

Kode Program	2.h.
Program Kerja	Penerapan manajemen pengetahuan
Kegiatan/Sub Kegiatan	
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	BKPSDM, Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. BKPSDM menyusun/reviu pedoman manajemen pengetahuan 2. BKPSDM mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang manajemen pengetahuan 3. BKPSDM melaksanakan kegiatan berbagi informasi dan pengetahuan antara pelaksana dan atasan langsung (coaching dan mentoring) 4. Melakukan kegiatan ASN coaching dan mentoring di lingkungan Pemerintah Kota Padang
Rincian khusus kegiatan tahun 2024	1. BKPSDM menyusun pedoman manajemen pengetahuan dalam bentuk coaching dan mentoring 2. BKPSDM menyusun edaran pelaksanaan coaching dan mentoring 3. BKPSDM melaksanakan kegiatan coaching dan mentoring 4. BKPSDM melakukan dokumentasi/rekapitulasi

	kegiatan coaching dan mentoring 5. Dinas Komunikasi dan Informatika membuat aplikasi learning machine system (LMS) sebagai tempat media pembelajaran coaching dan mentoring
Output yang dihasilkan	1. Dokumen kebijakan manajemen pengetahuan dalam bentuk SK 2. Dokumentasi kegiatan masing-masing ASN melakukan coaching dan mentoring yang diinputkan pada aplikasi LMS.

2.i. Penerapan manajemen perubahan

Kode Program	2.i
Program Kerja	Penerapan manajemen perubahan
Kegiatan/Sub Kegiatan	
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Bagian Organisasi
Rincian Program Kerja	1. Penyusunan/reviu pedoman manajemen perubahan 2. Mengidentifikasi hal-hal terkait SPBE yang perlu ditingkatkan 3. Menyampaikan usulan perubahan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan 4. Menyusun perubahan yang disetujui 5. Menyiapkan dan menyediakan segala sumber daya dan data untuk mendukung proses perubahan 6. Melakukan sosialisasi tentang perubahan yang dilakukan 7. Melakukan pemantauan dan pengelolaan terkait risiko perubahan, resistansi dan dampak dari perubahan 8. Melakukan evaluasi, revisi dan perbaikan secara terus menerus
Output yang dihasilkan	1. Dokumen kebijakan manajemen perubahan dalam bentuk SK 2. Dokumentasi pemantauan, pengelolaan perubahan yang dilakukan.

2.j. Penerapan manajemen layanan SPBE

Kode Program	2.j.
Program Kerja	Penerapan manajemen layanan SPBE
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Penyusunan/reviu pedoman manajemen layanan SPBE 2. Menyusun dokumen siklus layanan SPBE

	(strategi, pengembangan, operasional dan evaluasi) 3. Membuat SOP setiap siklus layanan SPBE 4. Menyusun daftar layanan SPBE 5. Membuat SLA layanan SPBE 6. Membuat mekanisme layanan bantuan setiap layanan SPBE
Output yang dihasilkan	1. Dokumen kebijakan manajemen layanan SPBE dalam bentuk SK 2. Dokumen daftar layanan SPBE beserta SLA dan layanan bantuan.

2.k. Evaluasi penerapan manajemen SPBE

Kode Program	2.k.
Program Kerja	Evaluasi penerapan manajemen layanan SPBE
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo, BKPSDM, Inspektorat, Bagian Organisasi
Rincian Program Kerja	1. Melakukan evaluasi penerapan manajemen SPBE secara berkala 2. Menyusun laporan evaluasi.
Output yang dihasilkan	1. Dokumen evaluasi penerapan manajemen SPBE

3. Layanan

3.a. Pembuatan dan/atau reviu kebijakan internal layanan SPBE

Kode Program	3.a
Program Kerja	Pembuatan dan/atau reviu kebijakan internal layanan SPBE
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo, Bagian Hukum
Rincian Program Kerja	1. memahami konsep dasar layanan SPBE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. mencari referensi pedoman dari peraturan layanan SPBE dari K/L terkait. 3. melakukan evaluasi dan/atau reviu terhadap kebijakan layanan SPBE sesuai arahan pemerintah pusat. 4. Melakukan penyusunan/perbaikan regulasi kebijakan layanan SPBE sesuai rekomendasi hasil reviu 5. mendapatkan pengesahan perbaikan regulasi kebijakan dari Bagian Hukum
Output yang dihasilkan	3. dokumen kebijakan layanan SPBE dalam bentuk SK 4. notulensi/catatan/laporan, foto dan dokumen lainnya terkait reviu kebijakan layanan SPBE yang telah dilakukan

3.b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kode Program	3.b
Program Kerja	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Penyusunan SOP hosting 2. Menyusun dokumen pengelolaan hosting 3. Melakukan Monitoring dan evaluasi server hosting dan aplikasi hosting
Output yang dihasilkan	1. Dokumen SOP hosting 2. Dokumentasi pengelolaan hosting dan monitoring evaluasi server dan aplikasi hosting.

3.c. Penatalaksanaan dan Pengawasan implementasi sistem informasi/aplikasi layanan administrasi pemerintah

Kode Program	3.c
Program Kerja	Penatalaksanaan dan Pengawasan implementasi sistem informasi/aplikasi layanan administrasi pemerintah
Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Penyusunan SOP penatalaksanaan dan pengawasan implementasi sistim informasi / aplikasi 2. Membuat repository penyimpanan master sistim informasi / aplikasi beserta manualnya 3. Membuat daftar sistim informasi/aplikasi yang telah digunakan perangkat daerah 4. Melakukan Monitoring dan evaluasi implementasi sistim informasi/aplikasi yang digunakan perangkat daerah 5. Membuat laporan monitoring dan evaluasi implementasi sistim informasi/aplikasi
Output yang dihasilkan	1. Dokumen SOP penatalaksanaan dan pengawasan implementasi sistim informasi / aplikasi 2. Dokumentasi pengelolaan sistim informasi / aplikasi 3. Monitoring dan evaluasi sistim informasi / aplikasi yang digunakan perangkat daerah

3.d. Penyediaan akses internet yang berkualitas

Kode Program	3.d
Program Kerja	Penyediaan akses internet yang berkualitas
Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Monitoring dan evaluasi penggunaan bandwidth setiap perangkat daerah menggunakan tool NMS dan Cacti 2. Analisa kebutuhan bandwidth setiap perangkat daerah 3. Melakukan pengelolaan kebutuhan bandwidth 4. Penyediaan layanan perbaikan kerusakan jaringan internet berupa Engineer on Site, penggantian alat, dll. 5. SLA dari penyedia layanan internet
Output yang dihasilkan	1. Dokumen laporan pengelolaan bandwidth 2. Dokumen laporan kerusakan jaringan internet perangkat daerah

3.e. Pengembangan dan perbaikan layanan publik

Kode Program	3.e
Program Kerja	Pengembangan dan perbaikan layanan publik
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi layanan publik perangkat daerah 2. Melakukan analisa proses bisnis aplikasi layanan publik perangkat daerah 3. Melakukan pengembangan dan/atau perbaikan aplikasi layanan publik sesuai hasil analisa dan permintaan perangkat daerah
Output yang dihasilkan	1. Dokumen SDLC dan/atau analisa proses bisnis aplikasi layanan publik 2. Dokumentasi pengembangan dan/atau perbaikan aplikasi

3.f. Audit Layanan SPBE

Kode Program	3.f
Program Kerja	Audit Layanan SPBE
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Melakukan audit terhadap aplikasi pelayanan publik sesuai pedoman yang audit aplikasi

	BRIN 2. Menyusun rekomendasi dari hasil audit yang dilakukan
Output yang dihasilkan	1. Dokumen audit aplikasi layanan publik 2. Dokumentasi rekomendasi dari hasil audit

3.g. Tindak lanjut hasil audit layanan SPBE

Kode Program	3.g
Program Kerja	Tindak lanjut hasil audit layanan SPBE
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	Melakukan perbaikan sesuai rekomendasi hasil audit layanan SPBE
Output yang dihasilkan	Dokumen tindak lanjut hasil audit aplikasi layanan publik

3.h. Survey layanan SPBE

Kode Program	3.h
Program Kerja	Survey layanan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggung jawab	Diskominfo, Bagian Organisasi
Rincian Program Kerja	1. Membuat metode dan periode survey 2. Menyusun kuesioner survey 3. Melaksanakan survey 4. Mengumpulkan data survey 5. Melakukan analisa dan penilaian survey 6. Menampilkan hasil survey
Output yang dihasilkan	1. Dokumen laporan survey

4. Aplikasi

4.a. Perbaikan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE

Kode Program	4.a
Program Kerja	Perbaikan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. memahami konsep dasar pembangunan aplikasi SPBE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. mencari referensi pedoman dari peraturan pembangunan aplikasi SPBE dari K/L terkait. 3. melakukan evaluasi dan/atau reviu terhadap

	kebijakan pembangunan aplikasi SPBE sesuai arahan pemerintah pusat. 4. Melakukan penyusunan/perbaikan regulasi kebijakan pembangunan aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil reuiu 5. mendapatkan pengesahan perbaikan regulasi kebijakan dari Bagian Hukum
Output yang dihasilkan	1. dokumen kebijakan pembangunan aplikasi SPBE dalam bentuk SK 2. notulensi/catatan/laporan, foto dan dokumen lainnya terkait reuiu kebijakan pembangunan aplikasi SPBE yang telah dilakukan

4.b. Pengembangan aplikasi khusus sesuai kebutuhan perangkat daerah dan/atau Arsitektur Proses Bisnis SPBE

Kode Program	4.b
Program Kerja	Pengembangan aplikasi khusus sesuai kebutuhan perangkat daerah dan/atau Arsitektur Proses Bisnis SPBE
Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo, OPD terkait
Rincian Program Kerja	1. Menyusun data arsitektur proses bisnis yang terdapat dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Padang 2. Inventarisasi dan prioritas usulan pengembangan aplikasi usulan perangkat daerah yang menunjang arsitektur proses bisnis 3. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pengembangan aplikasi khusus menunjang arsitektur proses bisnis 4. Melakukan tahapan analisa kebutuhan, perencanaan, desain, implementasi desain, testing, pembuatan dokumentasi/manual book, deployment, maintenance 5. Penggunaan aplikasi oleh perangkat daerah 6. Evaluasi penggunaan aplikasi 7. Menyiapkan layanan help desk aplikasi
Output yang dihasilkan	1. Aplikasi khusus 2. Dokumentasi manual book aplikasi 3. Master coding aplikasi untuk disimpan di repository

4.c. Koordinasi aplikasi umum dan aplikasi khusus pemerintah pusat

Kode Program	4.c
Program Kerja	Koordinasi aplikasi umum dan aplikasi khusus pemerintah pusat
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027

Penanggung jawab	Diskominfo, OPD terkait
Rincian Program Kerja	1. Memfasilitasi OPD terkait dalam penggunaan API aplikasi umum / khusus yang dimiliki pemerintah pusat 2. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait kebutuhan API aplikasi umum dan aplikasi khusus yang akan digunakan 3. Menyediakan sarana internet dan server jika dibutuhkan
Output yang dihasilkan	1. Terlaksananya penggunaan aplikasi umum dan aplikasi khusus perangkat daerah

4.d. Pengembangan Integrasi antar aplikasi

Kode Program	4.d
Program Kerja	Pengembangan Integrasi antar aplikasi
Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo, OPD terkait
Rincian Program Kerja	1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pengembangan integrasi antar aplikasi khusus 2. Melakukan tahapan analisa kebutuhan, perencanaan, desain, implementasi desain, testing, pembuatan dokumentasi/manual book, deployment, maintenance 3. Penggunaan metode file sharing, database sharing, dan API untuk integrasi antar aplikasi 4. Penambahan coding file sharing, database sharing, dan API untuk integrasi antar aplikasi 5. Penggunaan aplikasi yang telah terintegrasi oleh perangkat daerah 6. Evaluasi penggunaan aplikasi 7. Menyiapkan layanan help desk aplikasi
Output yang dihasilkan	1. Dokumentasi integrasi antar aplikasi 2. Master coding aplikasi untuk disimpan di repository

4.e. Pengembangan portal data Pemerintah Kota Padang sesuai Satu Data Indonesia

Kode Program	4.e
Program Kerja	Pengembangan portal data Pemerintah Kota Padang sesuai Satu Data Indonesia
Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo, OPD terkait

Rincian Program Kerja	1. Instalasi portal data CKAN Satu Data Indonesia 2. Melakukan koordinasi pengumpulan data dengan perangkat daerah sebagai produsen data 3. Pengisian data pada portal data CKAN 4. Evaluasi penggunaan portal data CKAN 5. Menyiapkan layanan help desk portal data CKAN
Output yang dihasilkan	1. Portal data CKAN Pemerintah Kota Padang

- 4.f. Penggunaan Aplikasi Umum di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian dan pengaduan pelayanan publik

Kode Program	4.f
Program Kerja	Penggunaan Aplikasi Umum di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian dan pengaduan pelayanan publik
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Penggunaan aplikasi SIPD-RI untuk perencanaan, penganggaran dan penatausahaan 2. Penggunaan aplikasi OSS untuk pengurusan perijinan berusaha 3. Penggunaan aplikasi SPSE/LPSE untuk pengadaan barang dan jasa 4. Penggunaan aplikasi E-kinerja BKN untuk kinerja pegawai 5. Penggunaan aplikasi LAPOR untuk pengaduan dan aspirasi 6. Penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk pengelolaan kearsipan dinamis 7. Penggunaan aplikasi SIAK Online untuk pengelolaan dokumen kependudukan 8. Penggunaan aplikasi SIKS-NG untuk pengelolaan kesejahteraan sosial masyarakat 9. Penggunaan aplikasi DAPODIK untuk pengelolaan data pokok pendidikan
Output yang dihasilkan	1. Aplikasi umum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat telah digunakan oleh Pemerintah Kota Padang

4.g. Audit Aplikasi SPBE

Kode Program	4.g
Program Kerja	Audit Aplikasi SPBE
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Melakukan audit terhadap aplikasi SPBE sesuai pedoman BRIN menggunakan tools yang disediakan pada laman : https://audit-tools-spbe.brin.go.id/webaudit/ 2. Menyusun rekomendasi dari hasil audit yang dilakukan
Output yang dihasilkan	1. Dokumen audit aplikasi SPBE 2. Dokumentasi rekomendasi dari hasil audit

4.h. Tindak lanjut hasil audit aplikasi SPBE

Kode Program	4.h
Program Kerja	Tindak lanjut hasil audit aplikasi SPBE
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	Melakukan perbaikan sesuai rekomendasi hasil audit aplikasi SPBE
Output yang dihasilkan	Dokumen tindak lanjut hasil audit aplikasi SPBE

5. Infrastruktur

5.a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kota Padang

Kode Program	5.a
Program Kerja	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kota Padang
Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Penyusunan milestone pusat data Pemerintah Kota Padang tahun 2023-2027 2. Penyusunan rencana pengembangan pusat data Pemerintah Kota Padang tahun 2023-2027 meliputi pengadaan, pemeliharaan, ketersediaan SDM, ruangan, dan sarana prasarana lainnya. 3. Penyusunan Standar Pedoman Operasional Pusat Data 4. Penyusunan SOP Akses Ruang Pusat Data 5. Penyusunan SOP Pemulihan Bencana 6. Pengelolaan layanan data center

	7. Pengelolaan layanan help desk
Output yang dihasilkan	2. Pusat data Pemerintah Kota Padang yang dikelola dengan baik

5.b. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Kode Program	5.b
Program Kerja	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Penetapan ruang lingkup Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Padang menggunakan splp.layanan.go.id 2. Penetapan aplikasi perangkat daerah yang dapat diintegrasikan 3. Pembuatan dokumen desain API (<i>Application Programming Interface</i>) aplikasi perangkat daerah 4. Penyusunan pedoman pengoperasional Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Padang 5. Penyusunan SOP Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Padang 6. Pengelolaan layanan help desk
Output yang dihasilkan	1. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang dikelola dengan baik 2. Dokumen Pedoman, SOP Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Padang

5.c. Penyelenggaraan Jaringan Internet Pemerintah Kota Padang

Kode Program	5.c
Program Kerja	Penyelenggaraan Jaringan Internet Pemerintah Kota Padang
Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Penyusunan milestone jaringan internet Pemerintah Kota Padang tahun 2023-2027 2. Penyusunan rencana pengembangan jaringan internet Pemerintah Kota Padang tahun 2023-2027 meliputi pengadaan, pemeliharaan, ketersediaan SDM, dan sarana prasarana

	lainnya. 3. Penetapan SLA Jaringan Internet 4. Penyusunan SOP Pengelolaan Jaringan Internet 5. Penyusunan SOP Perbaikan Kerusakan Jaringan Internet 6. Evaluasi kinerja jaringan internet 7. Pengelolaan layanan help desk
Output yang dihasilkan	1. Terselenggaranya jaringan internet di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang dikelola dengan baik 2. Dokumentasi pengelolaan jaringan, perbaikan kerusakan, pemeliharaan, dll.

5.d. Penyelenggaraan Jaringan Intranet Pemerintah Kota Padang

Kode Program	5.d
Program Kerja	Penyelenggaraan Jaringan Intranet Pemerintah Kota Padang
Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Penyusunan milestone jaringan intranet Pemerintah Kota Padang tahun 2023-2027 2. Penyusunan rencana pengembangan jaringan intranet Pemerintah Kota Padang tahun 2023-2027 meliputi pengadaan, pemeliharaan, ketersediaan SDM, dan sarana prasarana lainnya. 3. Penetapan SLA Jaringan Intranet 4. Penyusunan SOP Pengelolaan Jaringan Intranet 5. Penyusunan SOP Perbaikan Kerusakan Jaringan Intranet 6. Evaluasi kinerja jaringan intranet 7. Pengelolaan layanan help desk
Output yang dihasilkan	1. Terselenggaranya jaringan intranet di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang dikelola dengan baik 2. Dokumentasi pengelolaan jaringan, perbaikan kerusakan, pemeliharaan, dll.

5.e. Pemanfaatan layanan Pusat Data Nasional

Kode Program	5.e
Program Kerja	Pemanfaatan layanan Pusat Data Nasional
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Melakukan penilaian kondisi terkini pertumbuhan kebutuhan penggunaan pusat data, ketersediaan perangkat keras dan lunak,

	pengadaan perangkat keras dan lunak, ketersediaan anggaran, keamanan, dan faktor lainnya. 2. Penetapan aplikasi yang akan ditempatkan di Pusat Data Nasional 3. Mengajukan permohonan penggunaan layanan pusat data nasional 4. Melakukan setting dan instalasi pada server pusat data nasional 5. Melakukan migrasi aplikasi dari server Pemerintah Kota Padang ke server pusat data nasional 6. Mematuhi SOP penggunaan pusat data nasional
Output yang dihasilkan	1. Beberapa aplikasi penting di hosting pada Pusat Data Nasional

5.f. Audit Infrastruktur SPBE

Kode Program	5.f
Program Kerja	Audit Infrastruktur SPBE
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Melakukan audit terhadap infrastruktur SPBE sesuai pedoman BRIN menggunakan tools yang disediakan pada laman : https://audit-tools-spbe.brin.go.id/webaudit/ 2. Menyusun rekomendasi dari hasil audit yang dilakukan
Output yang dihasilkan	1. Dokumen audit infrastruktur SPBE 2. Dokumentasi rekomendasi dari hasil audit

5.g. Tindak lanjut hasil audit infrastuktur SPBE

Kode Program	5.g
Program Kerja	Tindak lanjut hasil audit infrastrukturu SPBE
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	Melakukan perbaikan sesuai rekomendasi hasil audit infrastruktur SPBE
Output yang dihasilkan	Dokumen tindak lanjut hasil audit infrastruktur SPBE

6. Keamanan

6.a. Pengendalian keamanan informasi SPBE terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastuktur SPBE

Kode Program	6.a
Program Kerja	Pengendalian keamanan informasi SPBE terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastuktur SPBE
Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Menetapkan isu internal dan isu eksternal keamanan informasi SPBE di lingkup Pemerintah Kota Padang 2. Menetapkan standar teknis dan prosedur keamanan informasi SPBE berdasarkan isu internal dan eksternal 3. Menetapkan pelaksana teknis keamanan informasi SPBE di setiap perangkat daerah 4. Penyusunan program kerja keamanan informasi SPBE meliputi edukasi, assesment, peningkatan, penanganan insiden dan audit keamanan informasi SPBE 5. Menjamin ketersediaan SDM dengan kompetensi keamanan aplikasi dan infrastruktur TIK 6. Melakukan review berkala serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan keamanan informasi SPBE 7. Melakukan perbaikan atas hasil evaluasi penyelenggaraan keamanan informasi SPBE
Output yang dihasilkan	1. Terselenggaranya keamanan informasi SPBE di lingkup Pemerintah Kota Padang dengan baik 2. Dokumen review berkala serta monitoring dan evaluasi serta perbaikan penyelenggaraan keamanan informasi SPBE

6.b. Pembangunan server backup atau server bayangan

Kode Program	6.b
Program Kerja	Pembangunan server backup atau server bayangan
Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Asesmen kondisi actual server berisi aplikasi yang sering digunakan di pusat data

	2. Inventarisasi jumlah space yang digunakan masing-masing aplikasi 3. Pembuatan script untuk melakukan backup otomatis ke server backup secara berkala 4. Penyiapan server fisik untuk backup
Output yang dihasilkan	1. Terlaksana backup otomatis ke server backup secara berkala 2. Dokumen asesmen kondisi server

6.c. Pembentukan Computer Security Incident Response Team Padang-CSIRT

Kode Program	6.c
Program Kerja	Pembentukan Computer Security Incident Response Team Padang-CSIRT
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Kegiatan/Sub Kegiatan	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Penyusunan dokumen aset server, aset aplikasi dan aset software yang dimiliki. 2. Penyusunan dokumen topologi jaringan yang dimiliki 3. Penyusunan SOP Penanganan Insiden 4. Inventarisasi SDM dengan kompetensi keamanan aplikasi dan infrastruktur TIK 5. Penetapan SDM menjadi Tim CSIRT dengan SK Wali Kota. 6. Menyediakan portal layanan pelaporan insiden
Output yang dihasilkan	1. Terbentuknya Tim CSIRT 2. Penanganan insiden sesuai ketentuan yang berlaku

6.d. Pembentukan Agen Padang-CSIRT

Kode Program	6.d
Program Kerja	Pembentukan Agen Padang -CSIRT
Kegiatan/Sub Kegiatan	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Inventarisasi SDM dengan kompetensi keamanan aplikasi dan infrastruktur TIK 2. Penetapan SDM menjadi Agen Padang-CSIRT dengan SK Wali Kota.

	3. Menyediakan portal layanan pelaporan insiden 4. Peningkatan kompetensi SDM Agen Padang-CSIRT melalui Bimbinagn teknis dan sosialisasi
Output yang dihasilkan	1. Terbentuknya Agen Padang-CSIRT 2. Penanganan insiden sesuai ketentuan yang berlaku 3. Terdeteksinya insiden siber lebih dini 4. Kompetensi SDN kemandirian siber merata di seluruh perangkat daerah dalam penanganan insiden siber

6.e. Melaksanakan penialain Indeks KAMI secara mandiri

Kode Program	6.e
Program Kerja	Melaksanakan penialain Indeks KAMI secara mandiri
Kegiatan/Sub Kegiatan	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Membentuk tim penilaian mandiri Indeks KAMI 2. Terlaksananya penyusunan data dukung Indeks KAMI berdasarkan instrumen dan standar yang ditetapkan oleh BSSN 3. Melaksnaakan penilaian mandiri indeks KAMI berdasarkan data dukung yang telah disusun 4. Melaksanakan tindak lanjut sesjuai dengan hasil penilaian mandiri 5. Terlaksananya verifikasi eksternal indeks KAMI oleh Badan Siber dan Sandi Negara berdasarkan hasil penilaian mandiri 6. Melaksanakan tindak lanjut sesjuai dengan hasil verifikasi BSSN
Output yang dihasilkan	1. Terbentuknya SK Tim penilaian mandiri Indeks KAMI 2. Tersusunnya data dukung indeks KAMI berdasarkan instrumen yang ditetapkan oleh BSSN 3. Hasil Indeks KAMI mandiri yang akan diajukan sebagai dasar verifikasi eksternal Badan Siber dan Sandi Negara 4. Terlaksananya penilaian eksternal indeks KAMI oleh BSSN 5. Hasil Indeks KAMI eksternal dari Badan Siber dan Sandi Negara

- 6.f. Bimbingan Teknis Kewaspadaan Kebocoran Data, Kewaspadaan Malware bagi Team CSIRT dan Agen CSIRT Pemerintah Kota Padang, Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Kode Program	6.f
Program Kerja	Bimbingan Teknis Kewaspadaan Kebocoran Data, Kewaspadaan Malware bagi Team CSIRT dan Agen CSIRT Pemerintah Kota Padang, Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
Kegiatan/Sub Kegiatan	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Inventarisasi SDM dengan kompetensi keamanan aplikasi dan infrastruktur TIK 2. Melakukan koordinasi dengan BSSN terkait menjadi nara sumber pada kegiatan bimbingan teknis 3. Menentukan tanggal pelaksanaan bimbingan teknis 4. Persiapan pelaksanaan bimbingan teknis berupa rapat, dll. 5. Pelaksanaan bimbingan teknis
Output yang dihasilkan	1. Terlaksananya bimbingan teknis dan sosialisasi yang merupakan salah satu program kerja edukasi keamanan informasi SPBE 2. Dokumentasi pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi

- 6.g. Penerapan metode penyimpanan data enkripsi secara bertahap pada aplikasi

Kode Program	6.e
Program Kerja	Penerapan metode penyimpanan data enkripsi secara bertahap pada aplikasi
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Asesmen kondisi actual aplikasi yang sering digunakan di pusat data 2. Inventarisasi jenis data yang digunakan masing-masing aplikasi 3. Pemilihan aplikasi yang akan dilakukan penyimpanan data enkripsi 4. Penambahan fungsi data enkripsi dan deskripsi pada proses penyimpanan data aplikasi yang dipilih

Output yang dihasilkan	1. Terlaksana penyimpanan data enkripsi secara bertahap pada aplikasi 2. Dokumen penambahan fungsi enkripsi dan deskripsi pada aplikasi
------------------------	--

6.h. Melaksanakan Vulnerabilily Assessment secara berka pada domain dan sub domain padang.go.id

Kode Program	6.h
Program Kerja	Melaksanakan Vulnerabilily Assessment secara berka pada domain dan sub domain padang.go.id
Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Inventarisasi aplikasi yang akan diperiksa 2. Penetapan metode pemeriksaan aplikasi sesuai pedoman 3. Menentukan tanggal dan petugas yang melaksanakan pengujian 4. Pelaksanaan pengujian
Output yang dihasilkan	1. Terlaksananya pengujian aplikasi sesuai pedoman 2. Dokumentasi hasil pengujian aplikasi

6.i. Melaksanakan Penetration Test dan/atau IT Security Assessment (ITSA) secara Regular

Kode Program	6.f
Program Kerja	Melaksanakan Penetration Test dan/atau IT Security Assessment (ITSA) mandiri secara Regular
Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Inventarisasi aplikasi yang akan diperiksa 2. Penetapan metode pemeriksaan aplikasi sesuai pedoman 3. Menentukan tanggal dan petugas yang melaksanakan pengujian 4. Pelaksanaan pengujian
Output yang dihasilkan	3. Terlaksananya pengujian aplikasi sesuai pedoman 4. Dokumentasi hasil pengujian aplikasi

6.j. Tindak lanjut hasil Vulnerability Assessment Penetration Test dan/atau ITSA

Kode Program	6.j
Program Kerja	Tindak lanjut hasil Penetration Test dan/atau ITSA
Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Membaca hasil pengujian aplikasi 2. Penetapan petugas yang akan melaksanakan perbaikan aplikasi
Output yang dihasilkan	1. Terlaksananya tindak lanjut hasil Penetration Test dan/atau ITSA 2. Dokumentasi perbaikan aplikasi

6.k. Melaksanakan penanganan insiden siber berdasarkan hasil monitoring siber rutin dan penagduan siber melalui kanal e-ticketting Padang-CSIRT

Kode Program	6.k
Program Kerja	Melaksanakan penanganan insiden siber berdasarkan hasil monitoring siber rutin dan penagduan siber melalui kanal e-ticketting Padang-CSIRT
Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Melakukan identifikasi dan investigasi terhadap insiden yang terdeteksi 2. Membaca hasil pengujian aplikasi 3. Penetapan petugas yang akan melaksanakan perbaikan aplikasi
Output yang dihasilkan	1. Hasil identifikasi dan investigasi insiden siber 2. Dokumentasi penanganan insiden siber

7. Audit TIK

7.a. Pembuatan kembali Kebijakan Internal SK atau aturan audit SPBE

Kode Program	6.a
Program Kerja	Pembuatan kembali Kebijakan Internal SK atau aturan audit SPBE
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027

Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. memahami konsep dasar audit SPBE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. mencari referensi pedoman dari audit SPBE dari K/L terkait. 3. melakukan evaluasi dan/atau reviu terhadap kebijakan audit SPBE sesuai arahan pemerintah pusat. 4. Melakukan penyusunan/perbaikan regulasi kebijakan audit SPBE sesuai rekomendasi hasil reviu 5. mendapatkan pengesahan perbaikan regulasi kebijakan dari Bagian Hukum
Output yang dihasilkan	1. dokumen kebijakan audit SPBE dalam bentuk SK 2. notulensi/catatan/laporan, foto dan dokumen lainnya terkait reviu kebijakan audit SPBE yang telah dilakukan

7.b. Melaksanakan audit aplikasi SPBE sesuai petunjuk teknis dari BRIN

Kode Program	7.b
Program Kerja	Melaksanakan audit aplikasi SPBE sesuai petunjuk teknis dari BRIN
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Penyusunan SK Auditor Aplikasi dan Infrastruktur SPBE 2. Menetapkan satu aplikasi untuk diaudit 3. Menetapkan auditor dan auditee aplikasi yang diaudit 4. Membuat dan mengirimkan surat permohonan pembuatan user auditor dan auditee untuk audit aplikasi ke BRIN dengan email layanan.auditspbe@brin.go.id 5. Memahami petunjuk teknis proses audit aplikasi yang disediakan BRIN pada laman audit-tools-spbe.brin.go.id/webaudit/ 6. Auditee dan auditor melaksanakan proses audit aplikasi sesuai petunjuk teknis BRIN
Output yang dihasilkan	1. Terlaksananya audit aplikasi sesuai petunjuk teknis BRIN 2. Hasil temuan dari auditor sesuai domain dan aspek yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu yang tertentu

7.c. Melaksanakan audit infrastruktur sesuai petunjuk teknis BRIN

Kode Program	7.c
Program Kerja	Melaksanakan audit infrastruktur sesuai petunjuk teknis BRIN
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Penyusunan SK Auditor Aplikasi dan Infrastruktur SPBE 2. Menetapkan infrastruktur untuk diaudit 3. Menetapkan auditor dan auditee infrastruktur yang diaudit 4. Membuat dan mengirimkan surat permohonan pembuatan user auditor dan auditee untuk audit infrastruktur ke BRIN dengan email layanan.auditspbe@brin.go.id 5. Memahami petunjuk teknis proses audit infrastruktur BRIN pada laman audit-tools-spbe.brin.go.id/webaudit/ 6. Auditee dan auditor melaksanakan proses audit infrastruktur sesuai petunjuk teknis BRIN
Output yang dihasilkan	1. Terlaksananya audit infrastruktur sesuai petunjuk teknis BRIN 2. Hasil temuan dari auditor sesuai domain dan aspek yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu yang tertentu

7.d. Melaksanakan audit keamanan SPBE berdasarkan Peraturan BSSN no.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi

Kode Program	7.d
Program Kerja	Melaksanakan audit keamanan SPBE berdasarkan Peraturan BSSN no.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Penyusunan SK Auditor keamanan SPBE 2. Menetapkan ruang lingkup audit keamanan SPBE 3. Menetapkan aplikasi/ infrastruktur yang akan diaudit dan tim auditi 4. Melakukan audit keamanan secara mandiri 5. Melakukan koordinasi dengan BSSN dalam pelaksanaan audit keamanan SPBE
Output yang dihasilkan	1. Terlaksananya audit keamanan SPBE secara mandiri sesuai petunjuk teknis BSSN 2. Laporan audit keamanan SPBE

7.e. Tindak lanjut hasil audit

Kode Program	7.e
Program Kerja	Tindak lanjut hasil audit
Tahun	2024, 2025, 2026, 2027
Penanggung jawab	Diskominfo
Rincian Program Kerja	1. Membaca hasil audit 2. Penetapan petugas yang akan melaksanakan perbaikan aplikasi
Output yang dihasilkan	1. Terlaksananya tindak lanjut hasil audit 2. Dokumentasi perbaikan aplikasi

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR